

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Banyumedia Publishing.
- Halim, Abdul. 2004, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, S. 1990. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, hal 15.
- Komarudin, 2000. Ensiklopedia Manajemen. Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. 2010. Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: Reflika Aditama.
- Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Amaliyah,H.(2011). Analisis hubungan proporsi pengeluaran dan konsumsi pangan dengan ketahanan pangan rumah tangga petani di kabupaten Klaten (Doctoral dissertation,Universitas Sebelas Maret).
- Arsana,I.P.J.(2016). Manajemen Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.Deepublish.
- Artantri,L.P.R.M.,Handajani,L.,&Pituringih,E.(2016). Peran e-procurement terhadap pencegahan Fraud pada pengadaan barang atau jasa Pemerintah Daerah di Pulau Lombok. *Neo-Bis*,10(1),16-32.
- Hidayat,R.(2015). Penerapan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata Pemerintah Daerah (Studi pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*,21(2),118-127.
- Makmur.(2010). Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Hal 7-8.
- Mulyono,E. (2013), implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak). *JPMIS*.
- Munir,M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement dalam Pengadaan Barang atau Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.Publika,3(4).

- Nugroho,E.(2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*,14(3),593-546.
- Nurchana, A.R.A. (2014). Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang atau jasa (studi terhadap penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*,2(2).
- Rahayu, Triana Puji, Saleh, Choirul, & Prasetyo, Wima Yudo. (2010). Implementasi Kebijakan *Eprocurement* Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 2,166-174. Retrieved from administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id.
- Rahayu, T. P. (2013). Implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi. *Jurnal Administrasi Publik*,1(2),290-298.
- Setryadiharja, Rendra. Nurmandi, Achmad. (2014). Implementasi Sistem *e-procurement* pada Layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. *Journal of Governance and Publik Policy* Vol 1, No 2.
- Susilawaty, S. (2007). Analisis kebijakan public bidang keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Tanesia, R. K. (2016). Studi efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah secara tradisional dan elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*,13(2),126-134.
- Yakobus Tefa, S. A. (2013). Korupsi dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik (*Corruption in the Government Procurement*). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*,2(4).
- Yuwinanto, H. P. (2013). Implementasi e-procurement pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jenjang Administrasi Publik*.

Peraturan/Regulasi

- Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
- Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018